

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Januari 2026

Provinsi Sulawesi Tengah mengalami inflasi bulanan sebesar 0,01% (mtm) pada bulan Januari 2026, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,14% (mtm). Realisasi inflasi bulanan tersebut merupakan yang terendah di kawasan Sulawesi dan menempati peringkat 11 dari 14 Provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Namun, realisasi bulanan tersebut lebih tinggi dari realisasi nasional yang mengalami deflasi 0,15% (mtm). Secara tahunan, Sulawesi tengah mengalami inflasi sebesar 4,55% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 3,31% (yoy), berada di atas rentang target inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Perkembangan inflasi IHK tahunan Sulawesi Tengah pada Januari 2026 yang berada di atas rentang sasaran inflasi dipengaruhi oleh faktor *base effect* seiring implementasi diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50% pada Januari – Februari 2025. Faktor *base effect* terutama disumbang oleh inflasi *administered prices* (AP) yang meningkat signifikan menjadi sebesar 11,98% (yoy) pada Januari 2026, dari 1,54% (yoy) pada Desember 2025. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 2,51% (yoy), lebih rendah dari Desember 2025 sebesar 2,64% (yoy). Kelompok *volatile food* mengalami inflasi sebesar 5,13% (yoy), lebih rendah dari Desember 2025 sebesar 7,83% (yoy).

Penurunan inflasi bulanan Sulawesi Tengah utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil -0,08% dengan komoditas utama penyumbang deflasi bulanan yaitu cabai rawit (-0,08%), ikan layang (-0,07%), dan cabai merah (-0,04%). Penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas utama penyumbang inflasi bulanan yaitu Emas Perhiasan (0,12%), Ikan Cakalang (0,11%), dan Ikan Selar (0,06%).[

2. Februari 2026

Provinsi Sulawesi Tengah mengalami inflasi bulanan sebesar 0,80% (mtm) pada bulan Februari 2026, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,01% (mtm). Realisasi inflasi bulanan tersebut menempati peringkat 5 dari 14 Provinsi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), dan juga realisasi bulanan tersebut masih lebih tinggi dari realisasi nasional sebesar 0,68% (mtm). Secara tahunan, Sulawesi Tengah mengalami inflasi sebesar 5,33% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 4,55% (yoy), berada di atas rentang target inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Inflasi tahunan Sulawesi Tengah pada Februari 2026 yang berada di atas rentang sasaran inflasi dipengaruhi oleh faktor low base effect seiring implementasi diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50% pada Januari – Februari 2025. Faktor base effect terutama disumbang oleh inflasi *administered prices* (AP) yang kembali meningkat menjadi sebesar 13,90% (yoy) pada Februari 2026, dari 11,98% (yoy) pada Januari 2026. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 2,61% (yoy), lebih tinggi dari Januari 2026 sebesar 2,51% (yoy). Kelompok *volatile food* mengalami inflasi sebesar 7,58% (yoy), lebih tinggi dari Januari 2026 sebesar 5,13% (yoy).

Kenaikan inflasi bulanan Sulawesi Tengah utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,61% dengan komoditas utama penyumbang inflasi bulanan yaitu emas perhiasan (0,18%), ikan cakalang (0,13%), dan cabai rawit (0,09%). Kenaikan inflasi lebih lanjut tertahan oleh Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar ~0,00% dengan andil komoditas penyumbang deflasi bulanan yaitu bawang merah (0,03%), Ikan Cakalang (-0,03 %), dan Ikan Selar (-0,01%).

3. Maret 2026

Provinsi Sulawesi Tengah mengalami inflasi bulanan sebesar 0,38% (mtm) pada bulan Maret 2026, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,80% (mtm) dan lebih rendah dari realisasi Nasional sebesar 0,41% (mtm). Secara tahunan, Sulawesi Tengah mengalami inflasi sebesar 2,83% (yoy), menurun signifikan dari bulan sebelumnya sebesar 5,33% (yoy) dan berada dalam rentang target inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy), realisasi tersebut menempatkan Sulawesi Tengah peringkat ke tiga terendah di kawasan Sulawesi.

Inflasi tahunan Sulawesi Tengah pada Maret 2026 menunjukkan tekanan harga yang lebih terkendali dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi komponen administered prices (AP) tercatat menurun signifikan menjadi sebesar 3,86% (yoy) dari 13,90% (yoy) pada Februari 2026, seiring berakhirnya penerapan kebijakan diskon tarif listrik khususnya pelanggan prabayar pada bulan Maret 2025. Sehingga basis perbandingan harga ternormalisasi setelah sebelumnya rendah pada bulan Januari s/d Februari 2025. Sementara itu, inflasi inti juga tercatat relatif stabil dan rendah sebesar 2,28% (yoy) pada Maret 2026, dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,61% (yoy), mencerminkan permintaan domestik yang masih terjaga. Kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 3,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 7,58% (yoy), didukung oleh pelaksanaan program pengendalian inflasi TPID Sulawesi Tengah.

Secara bulanan, inflasi Sulawesi Tengah utamanya tertahan oleh deflasi pada kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil masing-masing sebesar -0,02%. Dari sisi komoditas, penurunan inflasi bulanan Sulawesi Tengah didukung oleh deflasi pada komoditas angkutan udara (0,05%), ikan layang (0,04 %), dan emas perhiasan (0,02%). Penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,38%, dengan andil komoditas inflasi yakni cabai rawit (0,22%), telur ayam ras (0,07%), dan tomat (0,04%).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari data Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa pada triwulan II tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Tengah. dapat diidentifikasi bahwa :

1. Inflasi

Tabel 3 perkembangan inflasi triwulan I 2026 Provinsi Sulawesi Tengah

	m-to-m	y-o-y	y-o-d
April	1,12	2,97	2,81
Mei	0,28	2,52	2,61
Juni	0,05	2,47	2,57

Berdasarkan data diatas bahwa inflasi secara bulanan menunjukkan fluktuasi dengan inflasi positif di April dan Juni, serta deflasi pada Mei 2025. Secara tahunan, inflasi cenderung menurun dari April ke Juni 2025.

Permasalahan dalam pengendalian inflasi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah adalah lebih disebabkan oleh faktor alam dan letak geografis Provinsi Sulawesi Tengah serta sebagai penghubung distribusi barang ke Provinsi terdekat seperti Provinsi Gorontalo, Manado dan Ibu Kota Nusantara dan faktor cuaca buruk yang menyebabkan gangguan distribusi barang dan tidak luput dari pengaruh perekonomian global.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah terus dilaksanakan oleh TPID Provinsi Sulawesi Tengah dalam kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) hingga bulan Januari 2026 yaitu:

-

Keterjangkauan Harga

-

o Januari

-

- o Melanjutkan pelaksanaan sidak pasar rutin bersama TPID untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan strategis.
- o Mendorong optimalisasi penyaluran beras SPHP (BULOG) melalui pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), dan WARKOP TPID di Kota Palu, Luwuk, Sigi, dan Donggala.
- o Memberikan dukungan pelaksanaan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Luwuk, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso sepanjang Ramadhan 2026, bekerja sama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).
- o Melanjutkan program Gade Nolumako (pasar murah keliling) untuk memperluas akses pangan terjangkau hingga wilayah pelosok.

-

Ketersediaan Pasokan

Januari

- o Mendorong skema pasokan langsung dari kelompok tani binaan BI ke kegiatan pasar murah, khususnya untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit dari Poso dan Toili untuk wilayah Kota Palu dan Luwuk.
- o Melakukan identifikasi dan peninjauan kerja sama dengan produsen hortikultura di Kabupaten Poso sebagai sentra cabai untuk memperkuat konektivitas pasokan ke daerah konsumen.

Februari

- Melanjutkan perluasan Program PASUKAN (Lapas untuk Ketahanan Pangan) melalui gerakan penanaman komoditas hortikultura (bawang, cabai/rica, dan tomat) oleh warga binaan di Lapas se-Sulawesi Tengah guna memperkuat ketahanan pasokan pangan daerah.
- Melakukan identifikasi dan peninjauan kerja sama dengan produsen hortikultura di Kabupaten Poso sebagai salah satu sentra cabai di Sulawesi Tengah, untuk mendukung penguatan konektivitas pasokan dengan daerah konsumen seperti Kota Palu.

Kelancaran Distribusi

Januari

- Memberikan subsidi ongkos angkut (SOA) untuk komoditas cabai rawit, daging ayam ras, aneka ikan, dan daging sapi dari wilayah sentra ke lokasi pasar murah di Kota Palu, Luwuk, dan Tolitoli.
- Memberikan dukungan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) bekerja sama dengan TPID Kabupaten Tolitoli guna memastikan kelancaran distribusi pasokan.
- Melanjutkan pengembangan Modular Cooling Systems (CoolLar) hingga tahap uji lapangan serta penyusunan desain produk bekerja sama dengan ITS Surabaya sebagai upaya penguatan infrastruktur rantai dingin.

• Komunikasi Efektif

Januari

- Mengoptimalkan peran TPID melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Daerah untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi.
- Mengimplementasikan fitur Palu Pangan pada Aplikasi Sangu Palu sebagai sarana informasi harga, publikasi pasar murah, dan kanal pengaduan masyarakat.
- Melakukan pengendalian ekspektasi inflasi melalui kampanye belanja bijak bekerja sama dengan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah didapatkan gambaran bahwa diperlukan sinergitas antara Pemerintah Provinsi kepada TPID Kabupaten/kota dan Pusat serta Lembaga atau pihak lainnya yang terkait, perlu peningkatan alokasi anggaran untuk program/Kegiatan yang berkaitan dengan program penanganan pengendalian inflasi serta perlunya pelaporan realisasi pelaksanaan program atau tugas-tugas Perangkat Daerah dalam penanganan inflasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua TPID untuk bahan evaluasi atau koreksi pelaksanaan tugas TPID

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD)
2. Membuat atau memperkuat BUMD

Pelaksanaan Sidak pasar secara mingguan untuk memantau harga dan pasokan komoditas pangan serta penyaluran BBM dan LPG.

4. Optimalisasi kegiatan pasar murah dan pembentukan WARKOP (Warung Komoditas Pangan) TPID yang bersinergi dengan Bank Indonesia dan Bulog.
5. Perlu Upaya konkrit dalam meningkatkan produktivitas pangan utamanya beras dan tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat), memberikan dukungan penyaluran bibit dan pupuk dengan harga terjangkau.
6. Melakukan koordinasi penyediaan sarana prasarana pendukung hilirisasi pangan (cold storage dll).
7. Komunikasi kepada Masyarakat melalui tokoh agama, Masyarakat dan media masa terkait ketersediaan pasokan pangan.
8. Perlu edukasi program belanja bijak kepada Masyarakat agar tidak terjadi panic
9. Optimalisasi dan mengaplikasikan platform Sistem Informasi Pengendalian Harga dan Pasokan (SIDAK) untuk mengintegrasikan data harga pangan oleh Disperindag, neraca pangan oleh Dinas Pangan, dan commodity outflow oleh Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perhubungan.